



**KELOMPOK KERJA
INISIATIF PEMBANGUNAN
RENDAH EMISI
KABUPATEN JAYAPURA**



**Merencanakan
Memantau
Mengevaluasi**

Latar Belakang

Papua memiliki peran strategis dalam mensukseskan target penurunan emisi nasional mengingat luas hutan alam Papua mencapai lebih dari 25,8 juta hektar atau 83 persen dari total luas keseluruhan provinsi tersebut. Namun dengan tingkat pertumbuhan populasi yang pesat, rencana pembangunan yang mendorong investasi skala besar di berbagai aktivitas ekonomi berbasis lahan mengakibatkan provinsi ini rentan terhadap lonjakan emisi gas rumah kaca. Di kabupaten Jayapura, alih fungsi hutan termasuk konversi lahan basah sugu dan nipah menjadi perkebunan sawit tercatat sebagai pemicu utama perubahan tata guna lahan yang tak ayal juga menjadi kontributor emisi terbesar di kabupaten itu. Dengan topografi yang rumit, minimnya infrastruktur, kompleksitas hukum adat dan status kepemilikan lahan, maka proses perencanaan penggunaan lahan dalam mencapai pembangunan yang rendah emisi idealnya dilakukan secara bottom-up, partisipatif, serta mampu mengintegrasikan konteks lokal. Namun, kelompok pemangku kepentingan kunci di tingkat kabupaten maupun provinsi belum memiliki kapasitas teknis yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang isu perubahan iklim, strategi penurunan emisi dan konsekuensinya. Tak terkecuali, pemerintah di tingkat nasional pun belum cukup responsif terhadap kondisi di tingkat daerah. Pendekatan yang bersifat top-down menjadi jalan pintas yang kerap kali ditempuh untuk menyederhanakan proses penyusunan dan implementasi strategi penurunan emisi.



VISI

Jayapura yang mandiri dan lestari berbasis kearifan lokal



MISI

- Basis data dan informasi yang transparan serta kapasitas manusia dalam perencanaan pembangunan rendah emisi
- Hak-hak masyarakat adat dan sistem adat serta kearifan lokal terintegrasi dalam perencanaan pembangunan rendah emisi
- Pengetahuan, kesadaran, dan penghargaan dari para pihak dalam pemanfaatan lahan yang berkelanjutan
- Peran Pokja dan mitra kuncinya dalam menginisiasi dan mewujudkan pembangunan rendah emisi

Mendorong lahirnya
kesepahaman pema
berbasis lahan antara pa

Menghitung dan
merencanakan pengurangan
emisi pada sektor lahan di
masa yang akan datang
dengan metode LUWES

Merencanakan strategi
pembangunan rendah emisi
di tingkat kabupaten dan
menyusun pilihan skenario.
Harapannya skenario terpilih
dapat memberikan arahan
dan rekomendasi yang dapat
diimplementasikan dalam
perencanaan pembangunan
kabupaten melalui Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
(RTRWK)

Memfasilitasi proses
konsultasi publik
tentang perencanaan
pembangunan rendah
emisi



nya
faatan
ra pihak.

Dukungan terhadap pendekatan berjenjang, dari tingkat sub-nasional ke nasional, terhadap pembangunan rendah emisi

Tugas & Fungsi

Kesepakatan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah emisi yang mengetengahkan social safeguards.

Terfasilitasinya penyusunan RAD-GRK untuk sektor berbasis lahan di tingkat kabupaten secara inklusif, proses kompilasi dan negosiasi di tingkat provinsi, dan proses berjenjangnya sampai kepada tingkat nasional

Mempersiapkan dan mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat yang partisipatif terhadap implementasi pembangunan rendah emisi di tingkat kabupaten

Kegiatan Kelompok Perencanaan :

- Mengumpulkan data-data penggunaan lahan yang diperlukan untuk menghitung Reference Emission Level (REL)
- Menghitung garis acuan emisi/REL kabupaten Jayapura
- Menyusun rencana aksi mitigasi daerah (skenario penggunaan lahan) untuk perencanaan pembangunan rendah emisi
- Merekonsiliasi rencana pembangunan kabupaten Jayapura (RTRW/ RPJMD) dengan skenario penurunan emisi dalam upaya mencapai pembangunan rendah emisi
- Melakukan diskusi teknis dan konsultasi publik mengenai strategi penurunan emisi di berbagai sektor pembangunan di kabupaten Jayapura.
- Membuat dan mendorong rekomendasi kebijakan terkait perencanaan pembangunan rendah emisi daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura

Kegiatan Kelompok Pemantauan dan Evaluasi

- Membangun kerangka kerja pemantauan dan evaluasi untuk perencanaan penggunaan lahan
- Melakukan analisa terhadap kondisi perencanaan penggunaan lahan
- Membangun sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif perencanaan penggunaan lahan dengan menyusun prinsip, kriteria dan indikator yang meliputi aspek biosfisik, sosial dan ekonomi
- Melakukan uji coba implementasi sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif perencanaan penggunaan lahan
- Membuat dan mendorong rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah mengenai sistem pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi pembangunan emisi daerah

Kelompok IPRE

A kelompok perencanaan

Berperan dalam menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan dalam upaya pembangunan rendah emisi,

B kelompok yang memantau dan mengevaluasi

Untuk ikus perencanaan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan.



Keanggotaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berbasis Lahan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2. Dinas Kehutanan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Pertambangan dan Energi
5. Badan Lingkungan Hidup
6. Dinas Pertanian
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
9. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKPPSK)
10. Badan Pusat Statistik

Akademisi

1. Universitas Cendrawasih
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER)

LSM

1. Papua Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (pt.PPMA-P)
2. Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM)
3. Foker LSM
4. Papua Low Carbon - Task Force

Unsur Masyarakat

1. Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA)
2. Klasis Tanah Merah
3. Perwakilan Masyarakat Kampung Wambena
4. Perwakilan Masyarakat Kampung Yepase



Langkah 1

Proses Sosialisasi

Pada proses awal ini, sosialisasi kegiatan ParCiMon dilakukan kepada kelompok kepentingan kunci di kabupaten Jayapura melalui serangkaian lokakarya dan sosialisasi door to door ke beberapa instansi terkait.

Langkah 2

Analisis Pemangku Kepentingan & Jaringan

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi individu yang berpotensi untuk menjadi anggota Pokja. Pada tahapan ini juga dilakukan analisa hubungan antara para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan rendah emisi

Langkah 3

Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fungsi suatu lembaga, kegiatan, dan hubungan antar lembaga dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pembangunan tata ruang kabupaten

Langkah 4

Menyusun rencana kerja POKJA

Langkah ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai persepsi, peran, kebutuhan, serta harapan pemangku kepentingan di Jayapura terkait mitigasi perubahan iklim, strategi pembangunan rendah emisi serta implementasinya dalam bentuk rencana tata guna lahan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melalui awareness workshop dan serangkaian lokakarya dalam bentuk Training of Trainers (ToT).

Langkah 5

Identifikasi Mitra Kunci

Penetapan Pokja berikut keanggotaannya diperoleh melalui rapat dan diskusi dengan kelompok pemerintah kunci di Kabupaten Jayapura

Langkah 6

Identifikasi Calon Anggota POKJA

Melalui serangkaian rapat kecil dengan Bappeda, maka diperoleh sejumlah calon nama dari instansi terkait yang akan diproyeksikan menjadi anggota Pokja

Langkah 7

Formulasi

Penetapan Pokja berikut keanggotaannya diperoleh melalui rapat dan diskusi dengan kelompok pemerintah kunci di Kabupaten Jayapura

Langkah 8

Membangun Kerangka POKJA

Melalui Focus Group Discussion (FGD), akan diperoleh kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menyusun bentuk dan batang tubuh Pokja diantaranya adalah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pokja, aturan main, struktur, dan sekretariat Pokja yang akan dibangun di tingkat kabupaten.

Langkah 9

Pengesahan POKJA

Pokja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (IPRE) Jayapura telah memperoleh pengakuan secara hukum melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Bappeda Jayapura No. 050/257.a1 Tahun 2012.

Sebagai tindak lanjut SK tersebut, pada 12 Februari 2014, ICRAF dan Pemerintah Kabupaten Jayapura menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang "Pembentukan kelompok kerja dan penguatan kapasitas pemerintah daerah Jayapura dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura."

Langkah 10

Menyusun rencana kerja POKJA

Melalui serangkaian rapat dan lokakarya, anggota Pokja mulai merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja selama satu tahun. Penyusunan rencana kerja ini disusun dengan menggunakan pendekatan Outcome Mapping guna menyatukan visi dan misi seluruh anggota pokja untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan serta menyusun sistem pemantauan dan evaluasi rencana kerja tersebut. Kegiatan peningkatan kapasitas juga dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya untuk menyusun strategi perencanaan penggunaan lahan dan membangun sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan rendah emisi.

Didukung oleh :



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DANIDA INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION